



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta perubahan sasaran, arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu dilakukan perubahan target kinerja dan nomenklatur program Rencana Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 sebagai akibat adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi yang berorientasi hasil (*result oriented government*);
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 30/736/SJ, Pemerintah daerah melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018, perubahan target kinerja RPJMD ditetapkan dengan peraturan bupati ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Perubahan RPJMD Aceh Tengah Tahun 2017-2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat...

Mengingat :


1. Undang- Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8.Peraturan....L -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1446);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017-2022

Pasal I...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 12 Februari 2020

☞ BUPATI ACEH TENGAH, ☞

☞ 
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 12 Februari 2020

☞ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH, ☞


KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR⁸⁷⁰

3.1.1.3.			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85			90		90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	P-4	
3.1.1.4.		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase lembaga ipasyarakat yang aktif	%	30	30	40		55	65	500.000.000	75	750.000.000	75	1.250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	P-4
3.1.1.5.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelompok/binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	20	20	25		30	40	380.000.000	50	445.000.000	50	825.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	P-4
		Program Penataag Desa	Persentase kampung berbasis IT	%	60	60	70		80	90	666.500.000	95	750.000.000	95	1.416.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Kampung
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga, Adat yang adpt dan hukum adat yang dinia	%	Na					20	100.000.000	25	100.000.000	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Kampung	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	37.574.304.017	100	37.574.304.017	100	75.148.608.034	Kecamatan	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100		100	100			Kecamatan	
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85					90		Kecamatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN, DESA	Monitoring dan evaluasi DD								1.478.514.000		1.478.514.000	2.957.028.000	Kecamatan		
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												Kecamatan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Musrenbang Kecamatan	%	40	40	50	60	70	1.325.612.000	80	1.325.612.000	80	2.651.224.000	Kecamatan		
			Peningkatan peran Mukim	%	60				80			85	85		Kecamatan		
			Penyelenggaraan PATEN												Kecamatan		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sylar Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam								1.746.416.000		1.746.416.000	3.492.832.000	Kecamatan		
			MTQ Tk Kecamatan												Kecamatan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAN	Terselenggaranya pelayanan sosial dan kmasyarakat (Puspita, BKMT, PKK, spesialisasi KDRT, PHBS, Gij)								1.395.970.000		1.395.970.000	2.791.940.000	Kecamatan		
		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UJUM	Persentase Ormas yang dilina	%	na	na	40	50	60	950.000.000	65	1.100.000.000	65	2.050.000.000	Kecamatan		
Milai 4: Menwujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan											170.840.210.941		151.600.594.749	322.440.805.680			
4.1.		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi dan so jal kmasyarakat	Indeks pembangunan infrastruktur	Indeks	55,9	56,37	58,45			64,12			68,95	68,95			
4.1.1.		Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar berbasis kawasan yang berkelanjutan	Indeks aksesibilitas	Indeks	54,74	56,18	58,95			64,08			68,79	68,79			
			Rasio ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan kawasan	%	52,35	54,52	57,89			64,19			69,18	69,18			
4.1.1.1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	5.925.667.199	100	5.925.667.199	100	11.851.334.398	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.2.			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	8500%	9000%	90	95	100	100		100	100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3	
4.1.1.3.			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85			90	90		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3	
4.1.1.4.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	%	56,74	58,45	61,35	64,25	67,15	67,15	45.731.234.203	70,35	40.230.000.000	70,35	85.961.234.203	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.5.			Persentase pembangunan turap di kawasan rawan longsor	%	50	50	55	60	65	65	2.521.012.500	70	3.022.063.125	70	5.543.075.625	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.6.			Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	60	60	65	70	75	75	28.300.000.000	80	20.474.108.868	80	48.974.108.868	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.7.			Persentase pemangarin tanggap darurat jalan dan jembatan	%	na	na	50	55	60	60	1.980.000.000	65	2.000.000.000	65	3.980.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.8.			Rasio Sarana/Prasarana Kebnamargaan dalam kondisi baik	%	50	50	55	60	65	65	400.000.000	70	450.000.000	70	850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.9.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	0,43	0,45	50	55	60	60	2.510.000.000	65	3.126.000.000	65	5.636.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.10.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air rjinum dan air limbah	%	55	55	60	65	70	70	9.000.000.000	75	8.500.000.000	75	17.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	P-3
4.1.1.11.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan irigasi	%	22	25	30	35	40	40	22.000.000.000	45	17.853.318.143	45	39.853.318.143	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.12.			Persentase Pengurangan luas geugeran	%	30	30	35	40	45	45	300.000.000	50	350.000.000	50	650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.13.		Program Pengembangan Permukiman	Persentase ketersediaan infrastuktur pedesaan	%	50	50	55	60	65	65	12.651.839.000	70	10.518.390.000	70	23.170.229.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	P-3
4.1.1.14.			Persentase ketersediaan infrastuktur KSCT	%	50	50	55	60	65	65	400.000.000	70	450.000.000	70	1.050.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman	P-3
4.1.1.15.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Perencanaan Tata Ruang	%	na	50	60	65	70	70	906.000.000	75	1.100.000.000	75	2.006.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.16.			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	40	40	50	50	55	55	300.000.000	55	500.000.000	55	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3
4.1.1.17.			Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	20	20	25	25	30	30	200.000.000	35	250.000.000	35	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	P-3

6.1.1.31.			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan inovasi daerah yang dimanfaatkan	%	na	na	60	65	70	2.500.000.000	75	3.000.000.000	75	5.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	P-5
6.1.1.32.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	43.609.729.263	100	43.609.729.263	100	87.219.458.525	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.33.				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.34.				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.34.			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel	%	30	30	15	10	10	1.101.500.000	10	1.200.000.000	10	2.301.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.35.			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel	%						1.982.915.000		2.000.000.000		3.982.915.000	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.36.			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan yang dibina	%	50	50	60	65	70	3.976.000.000	75	4.000.000.000	75	7.976.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.37.				Persentase tertib Administrasi keuangan Desa	%	75	75	79	82	86	400.000.000	90	400.000.000	90	800.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.38.			Belanja Tidak Terduga								5.000.000.000		5.000.000.000		10.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.39.			Belanja Transfer								304.310.516.736		325.172.620.086		629.483.136.824	Badan Pengelolaan Keuangan	P-5
6.1.1.40.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	6.153.357.958	100	6.553.357.958	100	12.706.715.916	Inspektorat Kabupaten	P-5
6.1.1.41.				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Inspektorat Kabupaten	P-5
6.1.1.42.				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Inspektorat Kabupaten	P-5
6.1.1.43.			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut terapan hasil pengawasan internal dan eksternal	%	na	10	12	15	17	2.800.000.000	20	2.800.000.000	20	5.200.000.000	Inspektorat Kabupaten	P-5
6.1.1.44.				Jabatan fungsional APIP yang bersertifikasi	Orang	28	31	34	38	43	350.000.000	48	450.000.000	48	800.000.000	Inspektorat Kabupaten	P-5
6.1.1.45.			PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan area reformasi birokrasi PD	%	49,03	50	51	53	54	70.000.000	55	100.000.000	55	170.000.000	Inspektorat Kabupaten	P-5
6.1.1.46.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	7.188.235.879	100	7.188.235.879	100	14.376.471.758	BKPSDM	P-5
6.1.1.47.				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	BKPSDM	P-5
				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	BKPSDM	
			KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase dokumen formulir jabatan	%	75	75	80	85	85	2.750.000.000	90	2.500.000.000	90	5.250.000.000	BKPSDM	
				Persentase proses pemulangan/pensiun/mutasi tepat waktu	%	90	90	90	95	95	150.000.000	95	200.000.000	95	350.000.000	BKPSDM	
				Persentase SOP dan Standar Kompetensi	%	70	70	75	80	80	950.000.000	85	500.000.000	85	1.450.000.000	BKPSDM	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	40	50	60	70	80	350.000.000	90	450.000.000	90	800.000.000	BKPSDM	
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	60	60	60	65	70	2.700.000.000	80	2.750.000.000	80	5.450.000.000	BKPSDM	
				Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	%	50	55	60	70	80	500.000.000	90	500.000.000	90	550.000.000	BKPSDM	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	30.472.799.896	100	30.895.267.630	100	61.368.067.528	Serdakab	
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Serdakab	
				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Serdakab	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang telah dibina	%	60	60	65	70	80	4.010.000.000	80	4.110.000.000	80	8.120.000.000	Sekretariat Daerah	
				Persentase prolektas yang terrealisasi	%	75	75	80	85	90		95		95	-	Sekretariat Daerah	
				Peningkatan Kinerja Penataan daerah Otonomi Baru	%	55	55	60	70	80		90		90	-	Sekretariat Daerah	
				Indeks Pembangunan syariah Islam	%	50	55	60	65	70		85		85	-	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase PBI yang terrealisasi	%	60	60	70	75	80	3.410.000.000	90	3.650.000.000	90	7.060.000.000	Sekretariat Daerah	
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral/daerah	%	30	30	45	55	65		75		75	-	Sekretariat Daerah	
				Persentase inovasi industri kecil yang dibina	%	na	na	15	20	25		30		30	-	Sekretariat Daerah	
				Indeks Pertumbuhan Industri	%	na	30	35	40	50		60		60	-	Sekretariat Daerah	
				Persentase pengawasan barang perdagangan	%	40	45	50	60	70		80		80	-	Sekretariat Daerah	
				Persentase Promosi Produk Unggulan daerah	%	45	50	60	70	80	1.000.000.000	90		90	1.000.000.000	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase layanan keadanan KDH/Wakil KDH	%	75	75	80	84	88	5.585.000.000	90	5.650.000.000	90	11.245.000.000	Sekretariat Daerah	
				Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan komunikasi	%	30	50	60	70	80		90		90	-	setdakab	
				Persentase informasi publik yang dikelola	%	45		50	55	60		70		70	-	setdakab	
				Persentase ASN yang menguasai TIK	%	50	50	60	70	80		90		90	-	Setdakab	
				Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80		85		85	-	Setdakab	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	7.097.613.516	100	7.561.537.758	100	14.659.151.276	Sekretariat DPRK	
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Sekretariat DPRK	
				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Sekretariat DPRK	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase prolektas yang terrealisasi	%	75	75	80	85	90	4.403.775.000	95	4.605.800.000	95	9.009.575.000	Sekretariat Daerah	

			persentase layanan kebidanan lembaga DPRK	%	75	80	84	88	90	95	95	-	Sekretariat DPRK	
			Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80	85	85	-	Sekretariat DPRK	
			Program Layanan dan Administrasi (aplikasi)							90.000.000	150.000.000	240.000.000	Sekretariat DPRK	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							3.682.165.885	3.682.165.885	7.364.331.770	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	100	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100	100	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85		90	90	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							2.090.000.000	2.290.000.000	4.180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80	85	85	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase ASN yang menguasai TI &	%	50	50	60	70	80	90	90	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase pengembangan-Gov	%	35		40	45	60	75	75	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							690.000.000	790.000.000	1.480.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80	90	90	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase informasi publik yang dikelola	%	45		50	55	60	70	70	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							400.000.000	450.000.000	850.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral/daerah	%	30	30	45	55	65	75	75	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							250.000.000	350.000.000	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase informasi yang diamankan	%	na	na	20	30	35	40	40	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							50.000.000	100.000.000	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Koordinasi jaringan persandian	%	na	na	0	10	20	30	30	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							4.269.261.127	4.269.261.127	8.538.522.254	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	100	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100	100	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85		90	90	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							800.000.000	1.000.000.000	1.800.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	%	45	50	55	60	65	75	75	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							200.000.000	450.000.000	650.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	50	50	55	60	65	75	75	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase Sarpras kearsipan dalam kondisi baik	%	65	65	70	75	80	85	85	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			PROGRAM PERLUKUTAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							300.000.000	450.000.000	750.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase arsip daerah yang dilestarikan	%	50	50	60	65	70	75	75	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Misi 7: Mengajukan kedamaian, kerendahan spiritual dan kesahajaan masyarakat				0	0	0	42.271.196.550	45.525.796.550	87.796.993.100		
7.1.		Peningkatan kualitas pelayanan, pemeliharaan agama, Islam dalam kehidupan masyarakat	indeks pembangunan syariat islam	%	N/A	N/A	65		75		80			
7.1.1.		Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dim kehidupan bermasyarakat	indeks kesahajaan sosial masyarakat	%	N/A	N/A	50		65		75			
7.1.1.1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							3.784.655.406	3.784.655.406	7.569.310.812	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	P-6
7.1.1.2.			Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	100	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	P-6
7.1.1.3.			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100	100	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	P-6
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85		90	90	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	P-6
			PROGRAM SYARIAH ISLAM ACEH *****							5.000.000.000	4.300.000.000	9.500.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	P-6
			Persentase Ketersediaan Pendakwah/Ustadz bersertifikasi	%	na	na	30	35	40	45	45	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	P-6
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							1.450.834.318	1.465.834.318	2.916.668.636	Sek. Baitul Mal	
			Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	100	-	Sek. Baitul Mal	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100	100	-	Sek. Baitul Mal	
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85		90	90	-	Sek. Baitul Mal	
			Program Sekretariat Baitul Mal							650.000.000	720.000.000	1.370.000.000	Sek. Baitul Mal	
			Indeks Pembangunan syariat islam	%	50	55	60	65	70	85	85	-	Sek. MPU	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							1.073.200.903	1.096.800.903	2.170.001.806	Sek. MPU	
			Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	100	-	Sek. MPU	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100	100	-	Sek. MPU	
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85		90	90	-	Sek. MPU	
			PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH *****							700.000.000	850.000.000	1.550.000.000	Sek. MPU	
			Persentase fatwa/tahsin	%	65	65	70	75	80	85	85	-	Sek. MPU	
7.2.		Meningkatkan kesmihan, ketertiban dan ketegraman umum	indeks ketertiban dan ketegraman umum	%	45	50	55		65		70			
7.2.1.		Meningkatkan ketertiban kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan dan penanganan konflik sosial	%	30	35	40		55		60			
7.2.1.1.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							7.041.355.751	7.041.355.751	14.082.711.502	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hsbah	P-6
7.2.1.2.			Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hsbah	P-6
7.2.1.3.			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100	100	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hsbah	P-6
7.2.1.4.			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85		90	90	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hsbah	P-6
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							450.000.000	550.000.000	1.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hsbah	P-6
			Persentase Koordinasi Transtib	%	50	50	60	70	80	90	90	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hsbah	P-6

7.2.1.5		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UJUM	persentase penegak Qanun	%	60	65	70	75	80	2.400.000.000	85	2.350.000.000	85	4.750.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	P-6
7.2.1.6		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UJUM	Persentase Ormas yang dibina	%	na	na	40		50	150.000.000	65	200.000.000	65	350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	P-6
7.2.1.7		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	1.729.839.162	100	1.729.839.162	100	3.459.678.324	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	P-6
7.2.1.8			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90		95		100		100		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	P-6
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85				90		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
7.2.1.9		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang dibina	%	na	na	40		50	550.000.000	65	450.000.000	65	1.000.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	P-6
7.2.1.10		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kerjasama dim menjaga ketertiban dan keamanan	%	30	30	40		55	250.000.000	80	400.000.000	80	650.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	P-6
7.2.1.11			persentase penegak Qanun	%	60					100.000.000	85	100.000.000	85	200.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	P-6
7.2.1.12		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase penerbitan PEKAT	%	40	45	50		60	350.000.000	85	450.000.000	85	800.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	P-6
7.2.1.13		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	75	80	85		87	450.000.000	95	500.000.000	95	950.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	P-6
7.2.1.13		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	3.066.470.589	100	3.066.470.589	100	6.132.941.178	Dinas Sosial	P-6
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90		95		100		100		Dinas Sosial	
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85				90		Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	%	60	60	65		70	1.260.000.000	80	1.290.000.000	80	30.000.000	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		%	50	55	60		70	554.000.000	90	650.000.000	90	1.204.000.000	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terfajar yang dibina	%	40	50	55		60	300.000.000	80	500.000.000	80	800.000.000	Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang dibina	%	10	15	20		25	400.000.000	40	550.000.000	40	950.000.000	Dinas Sosial	
			Persentase parti sosial yang dibina	%	60	60	70		80	1.750.000.000	95	1.450.000.000	95	3.200.000.000	Dinas Sosial	
			Persentase Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	%	50	55	60		65	250.000.000	75	400.000.000	75	650.000.000	Dinas Sosial	
			Persentase Lembaga Kesejahteraan, Sosial yang dibina	%	50	50	60		70	500.000.000	90	650.000.000	90	1.150.000.000	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanggulangan tanggap darurat bencana	%	50	50	55		55	800.000.000	65	1.000.000.000	65	1.800.000.000	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	3.819.540.977	100	3.819.540.977	100	7.639.081.954	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90		95		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85				90		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase ketersediaan sarpras penanggulangan bahaya kebakaran	%	50	55	60		65	5.961.299.444	80	5.961.299.444	80	11.922.598.888	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Misal B: Mewujudkan ketahanan pangan,								9.704.299.788		10.354.299.788		20.058.599.576		
8.1.		Peningkatan ketahanan pangan melalui pengeneragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	78,7	87	89				93		95			
8.1.1.		Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Persentase kebun pegerni kampung (demapan)	%	70,16	72,26	75				78,26		80			
8.1.1.2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	3.154.299.788	100	3.154.299.788	100	6.308.599.576	Dinas Pangan	p-1
8.1.1.3			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90		95		100		100		Dinas Pangan	p-1
8.1.1.4			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85				90		Dinas Pangan	p-1
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan perkapita/tahun	%			20		40	1.550.000.000	80	2.200.000.000	80	3.750.000.000	Dinas Pangan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan Nilai/Skor Pola Pangan Harapan	Nilai			20		30	2.500.000.000	60	2.500.000.000	60	5.000.000.000	Dinas Pangan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganin daerah rawan pangan (prioritas 3 kesamatan)	%			20		45	1.717.400.000	85	1.717.400.000	85	3.434.800.000	Dinas Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								782.600.000		782.600.000		1.565.200.000	Dinas Pangan	
		Jumlah					0		0	1.357.765.140.680		1.465.754.269.079		2.827.519.409.758		

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

Klasifikasi Belanja kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah yang menggambarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Tengah untuk Tahun 2018-2022 yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Belanja Modal. Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
 Proyeksi Kapasitas Rill Belanja Daerah

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4
2	BELANJA DAERAH	1.234.720.934.010	1.642.200.553.021
2,1	Belanja Operasi	501.542.323.726	601.850.788.471
02.01.01	Belanja Pegawai	482.320.373.726	39,06
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	-	
02.01.03	Belanja Bunga	-	
02.01.04	Belanja Subsidi	-	
02.01.05	Belanja Hibah	2.500.000.000	3.000.000.000
02.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.721.950.000	20.066.340.000
2,2	Belanja Modal	-	
02.02.01	Belanja Tanah	-	
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	-	
02.02.03	Belanja Bangunan dan Gedung	-	
02.02.04	Belanja Jalan	-	
02.02.05	Belanja Irigasi dan Jaringan	-	
02.02.06	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	
	Program/Kegiatan :	423.868.093.546	508.641.712.255
-	Kegiatan Operasional Kantor, Rutin & Pembangunan	178.853.771.590	214.624.525.908

Kegiatan....

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4
-	Kegiatan bersumber dari dana JKN FKTP (Puskesmas)	15.000.000.000	18.000.000.000
-	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satdik SD dan SMP	22.486.800.000	26.984.160.000
-	Kegiatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	500.000.000	600.000.000
-	Kegiatan DOKA / OTSUS	102.039.234.614	122.447.081.537
2,3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000
2,4	Belanja Transfer	304.310.516.738	365.172.620.086
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	1.975.507.500	2.370.609.000
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	302.335.009.238	362.802.011.086
	Jumlah Belanja	1.234.720.934.010	1.480.665.120.812

Selanjutnya Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018-2022 di sajikan pada Table 7.2.

Tabel 7.2

Perubahan Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2022 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	U	P	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	1			Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										658.861.777.361						1.387.841.006.801	
1	01					Pendidikan										284.494.110.679						660.133.103.264	
						Dinas Pendidikan										282.201.968.830						561.383.719.166	
x	xx	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	100	237.046.119.968	100	237.046.119.968	100	474.092.239.936	Dinas Pendidikan			
x	xx	xx	02				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100			100	-	Dinas Pendidikan			
x	xx	xx	03				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90			90	-	Dinas Pendidikan			
1	01	xx	15				Persentase PAUD terakreditasi	%	80	82	85	88	90	2.374.280.800	93	2.191.708.880	100	4.565.989.680	Dinas Pendidikan				
1	01	xx	16				Level SNP	Nilai	3	3	4	5	6	32.158.001.431	6	30.364.321.488	100	62.522.322.919	Dinas Pendidikan				
1	01	xx	18			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PNF terakreditasi	%	82	82	85	88	89	920.426.231	94	1.200.000.000	100	2.120.426.231	Dinas Pendidikan				
1	01	xx	22				Peningkatan manajemen pendidikan	%	80	82	85	88	89	3.154.000.000	93	2.520.000.000	100	5.674.000.000	Dinas Pendidikan				
1	01	xx	24				Persentase Siswa berprestasi	%	na	na	30	35	40	1.000.000.000	45	1.000.000.000	50	2.000.000.000	Dinas Pendidikan				
1	01	xx	20			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga kependidikan berakreditasi	%	85	82	85	88	90	4.099.140.400	94	3.159.600.000	100	7.258.740.400	Dinas Pendidikan				
1	01	xx	25			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH *****)	Persentase daya berakreditasi	%	50	55	60	70	80	850.000.000	90	950.000.000	100	1.800.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah				
1	01	xx	26				Persentase Daya Mandiri	%	40	40	50	55	60	600.000.000	65	750.000.000	65	1.350.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah				
						Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah										2.292.141.849					98.749.384.098		
x	xx	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	1.391.282.249	100	1.441.282.249	100	2.832.564.498	Sek. MPD				
x	xx	xx	02				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100			100	-	Sek. MPD			
x	xx	xx	03				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90			90	-	Sek. MPD			
1	01	xx	20			PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	Persentase Tenaga kependidikan berakreditasi	%	85	82	85	88	90	900.859.600	94	95.015.960.000	100	95.916.819.600	Sek. MPD				
1	02					Kesehatan										185.019.834.093					365.409.494.551		
						Dinas Kesehatan										102.777.653.036					203.927.845.066		
x	xx	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	72.160.263.093	100	72.160.263.093	100	144.320.526.186	Dinas Kesehatan				
x	xx	xx	02				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100			100	-	Dinas Kesehatan			
x	xx	xx	03				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90			90	-	Dinas Kesehatan			
1	02	xx	15				Persentase ketersediaan obat	%	70	70	75	85	90	850.000.000	100	850.000.000	100	1.700.000.000	Dinas Kesehatan				
1	02	xx	16				Persentase capaian UHC	%	85	87	90	95	97	17.850.000.000	99	18.350.000.000	99	36.200.000.000	Dinas Kesehatan				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U r u s a n	B u d u s a n	P r o g r a m	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
1	02	XX	20	Program Perbaikan gizi masyarakat		Persentase stunting	%	57	57	30	20	15	300.000.000	10	350.000.000	10	650.000.000	Dinas Kesehatan			
1	02	XX	21	Program pengembangan lingkungan sehat		Persentase Kampung ODF	%	na	na	20	30	50	50.000.000	65	50.000.000	65	100.000.000	Dinas Kesehatan			
1	02	XX	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Persentase prevalensi Penyakit Menular	%	60	60	65	70	75	686.000.000	80	960.400.000	80	1.646.400.000	Dinas Kesehatan			
1	02	XX	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	75	75	100	100	100	1.990.370.000	100	1.159.407.000	100	3.149.777.000	Dinas Kesehatan			
1	02	XX	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu, dan lain sebagainya		Persentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik	%	60	65	72	80	90	8.091.019.943	100	6.470.121.937	100	14.561.141.880	Dinas Kesehatan			
1	02	XX	30	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan santun usia lanjut	%	na	na	35	50	60	50.000.000	75	50.000.000	75	100.000.000	Dinas Kesehatan			
1	02	XX	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		Persentase Izin Produk Industri Rumah Tangga	%	50	50	60	70	80	150.000.000	85	150.000.000	85	300.000.000	Dinas Kesehatan			
1	02	XX	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Angka kematian Ibu	Jiwa	60	60	65	70	75	250.000.000	80	250.000.000	80	500.000.000	Dinas Kesehatan			
1	02	XX	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Pengujian Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat	%	50	50	60	70	80	350.000.000	85	350.000.000	85	700.000.000	Dinas Kesehatan			
						BLUD RSU Datu Beru							82.242.181.057		79.239.468.428		161.481.649.485				
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	67.233.908.428	100	67.233.908.428	100	134.467.816.856	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon			
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon			
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon			
1	02	XX	33	Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSU		Persentase penduduk yang memanfaatkan RS	%	88	87	87	86	86	883.312.629	85	998.120.000	85	1.881.432.629	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon			
1	02	XX	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Persentase kemitraan asuransi kesehatan	%	64	64	64	64	64	124.960.000	64	157.440.000	64	282.400.000	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon			
1	02	XX	26	Program pengaduan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit		Persentase Sarpras RS dalam kondisi baik	%	88	87	87	86	86	14.000.000.000	85	10.850.000.000	85	24.850.000.000	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon			
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3							139.094.740.402		121.401.484.210		260.496.224.612				
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	5.925.667.199	100	5.925.667.199	100	11.851.334.398	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	XX	15	Program pembangunan jalan dan jembatan		Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	%	56,74	58,45	61,35	64,25	67,15	45.731.234.203	70,35	40.230.000.000	70,35	85.961.234.203	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	XX	17	Program pembangunan turap/taud/bronjong		Persentase pembangunan turap di kawasan rawan longsor	%	50	50	55	60	65	2.521.012.500	70	3.022.063.125	70	5.543.075.625	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	XX	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	60	60	65	70	75	28.300.000.000	80	20.674.108.868	80	48.974.108.868	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	XX	21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan		Persentase penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	%	na	na	50	55	60	1.980.000.000	65	2.000.000.000	65	3.980.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	XX	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Rasio Sarana/Prasarana Kabinamargaan dalam kondisi baik	%	50	50	55	60	65	400.000.000	70	450.000.000	70	850.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	U	R	P	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	03	xx	16				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	43%	45%	50	55	60	2.510.000.000	65	3.126.000.000	65	5.636.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	xx	27				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air minum dan air limbah	%	55	55	60	65	70	9.000.000.000	75	8.500.000.000	75	17.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	03	xx	24				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	%	22	25	30	35	40	22.000.000.000	45	17.853.318.143	45	39.853.318.143	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	xx	28				Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan luas genangan	%	30	30	35	40	45	300.000.000	50	350.000.000	50	650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	xx	30				Program pembangunan Infrastruktur pedesaan	Persentase ketersediaan Infrastruktur pedesaan	%	50	50	55	60	65	12.651.839.000	70	10.518.390.000	70	23.170.229.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	03	xx	29				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase ketersediaan Infrastruktur KSCT	%	50	50	55	60	65	400.000.000	70	650.000.000	70	1.050.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	03	xx	34				Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan Perencanaan Tata Ruang	%	na	50	60	65	70	906.000.000	75	1.100.000.000	75	2.006.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	xx	35				Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	40	40	50	50	55	300.000.000	55	500.000.000	55	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	03	xx	36				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	20	20	25	25	30	200.000.000	35	250.000.000	35	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
							Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase pembangunan turap di kawasan rawan	%	50					1.978.987.500		2.077.936.875		4.056.924.375	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	03	xx	16				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	43%					3.990.000.000	65	4.174.000.000	65	8.164.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04			1	4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								24.070.425.426		22.070.425.426		46.140.850.852				
x	xx	xx	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	8.090.425.426	100	8.090.425.426	100	16.180.850.852	Dinas Perumahan dan Permukiman			
x	xx	xx	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman			
x	xx	xx	03				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90		Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	xx	15				Program Pengembangan Perumahan	Jumlah RTLH	Angka	4000	3000	2500	2000	1500	8.000.000.000	1000	5.500.000.000	1000	13.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	xx	18				PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Rumah pasca bencana	%	45	45	50	55	60	1.000.000.000	65	1.500.000.000	65	2.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	xx	16				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Luas Kawasan Kumuh	ha	189,43	187	150	100	50	480.000.000	20	480.000.000	20	960.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	xx	20				Program pengelolaan areal pemakaman	Peningkatan pengelolaan areal pemakaman	%	na	50	60	70	80	500.000.000	90	500.000.000	90	1.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	04	xx	21				PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH	Persentase ketersediaan sarpras ibadah	%	50	50	55	60	65	3.500.000.000	70	3.500.000.000	70	7.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
x	xx	xx	07				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Persentase ketersediaan sarpras umum	%	35	35	40	45	50	2.500.000.000	60	2.500.000.000	60	5.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1	05			1	5		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								19.822.196.172		19.922.196.172		39.744.392.344				
							Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah								10.041.355.751		10.141.355.751		20.182.711.502				
x	xx	xx	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	7.041.355.751	100	7.041.355.751	100	14.082.711.502	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah			
x	xx	xx	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah			
x	xx	xx	03				Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U r u s a n	B U r u d a s a n a n	P r o g r a m	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	05	xx	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Persentase Koordinasi Transib	%	50	50	60	70	80	450.000.000	90	550.000.000	90	1.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatuj
1	05	xx	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penegakan Qanun	%	60	65	70	75	80	2.400.000.000	85	2.350.000.000	85	4.750.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatuj Hjsbah
1	05	xx	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ormas yang dibina	%	na	na	40	50	60	150.000.000	65	200.000.000	65	350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatuj Hjsbah
								Badan Penanggulangan Bencana Daerah							9.780.840.421		9.780.840.421		19.561.680.842		
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan Administrasi	%	95	95	100	100	100	3.819.540.977	100	3.819.540.977	100	7.639.081.954	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	100	100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur					Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85	90		90		90		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	04	xx	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase ketersediaan sarpras penanggulangan bahaya kebakaran	%	50	55	60	65	70	5.961.299.444	80	5.961.299.444	80	11.922.598.888	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06			SOSIAL	1	6		SOSIAL							6.360.470.589		9.556.470.589		15.916.941.178		
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	3.066.470.589	100	3.066.470.589	100	6.132.941.178	Dinas Sosial
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	100	100		100		100		Dinas Sosial
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur					Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85	90		90		90		Dinas Sosial
1	06	xx	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang telah dibina	%	60	60	65	70	80	1.260.000.000	80	1.290.000.000	80	30.000.000	Dinas Sosial
1	06	xx	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				PROGRAM PENANGANAN BENCANA		%	50	55	60	70	80	554.000.000	90	650.000.000	90	1.204.000.000	Dinas Sosial
1	06	xx	17	Program Pembinaan Anak Terlantar				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar yang dibina	%	40	50	55	60	70	300.000.000	80	500.000.000	80	800.000.000	Dinas Sosial
1	06	xx	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma					Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang dibina	%	10	15	20	25	30	400.000.000	40	550.000.000	40	950.000.000	Dinas Sosial
1	06	xx	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				PROGRAM REHABILITASI SO	Persentase panti sosial yang dibina	%	60	60	70	80	90	1.750.000.000	95	1.450.000.000	95	3.200.000.000	Dinas Sosial
1	06	xx	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)					Persentase Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	%	50	55	60	65	70	250.000.000	75	400.000.000	75	650.000.000	Dinas Sosial
1	06	xx	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	%	50	50	60	70	80	500.000.000	90	650.000.000	90	1.150.000.000	Dinas Sosial
1	06	xx	23	Program Peningkatan Penanggulangan Bencana				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanggulangan tanggap darurat bencana	%	50	50	55	55	60	800.000.000	65	1.000.000.000	65	1.800.000.000	Dinas Sosial

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	P	R	P	Metapan Pemendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
2	xx	24						Persentase RTH dengan kondisi baik	%	60	65		70		75		80	1.000.000.000	86	1.200.000.000	86	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2	06							ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2	12								6.683.489.570		6.883.489.570		13.566.979.140					
x	xx	xx	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			95	95	100	100	100	100	100	4.133.489.570	100	4.133.489.570	100	8.266.979.140	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
x	xx	xx	02					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85	90	90	95	100	100	100					100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
x	xx	xx	03					Program peningkatan disiplin aparatur			80	80		85							90		90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	06	xx	15					Program Penataan Administrasi Kependudukan			85	90	95	95	95	95	95	1.530.000.000	100	1.700.000.000	100	3.230.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
								Program Pencatatan Sipil												100	450.000.000	100	450.000.000	100	900.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													100	375.000.000	100	400.000.000	100	775.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Program Pengelolaan Profil Kependudukan													100	195.000.000	100	200.000.000	100	395.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	07							PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2	13								5.090.303.214		5.488.803.214		10.579.106.428					
x	xx	xx	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			95	95	100	100	100	100	100	3.443.803.214	100	3.443.803.214	100	6.887.606.428	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung				
x	xx	xx	02					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85	90	90	95	100	100	100					100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung			
x	xx	xx	03					Program peningkatan disiplin aparatur			80	80		85							90		90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung			
2	07	xx	15					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			30	30	40	55	65	65	65	500.000.000	75	750.000.000	75	1.250.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung				
2	07	xx	16					Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			20	20	25	30	40	40	40	380.000.000	50	445.000.000	50	825.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung				
2	07	xx	18					Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			60	60	70	80	90	90	90	666.500.000	95	750.000.000	95	1.416.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung				
								Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat			Na									20	100.000.000	25	100.000.000	25	200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
2	08							PENGENDALIAN PENDUDUK	2	14																	
2	08							Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera										4.322.674.000		5.467.674.000		9.790.348.000					
2	08	xx	15					Program Keluarga Berencana			75	78	80	85	90	90	90	2.317.674.000	95	2.817.674.000	95	5.135.348.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan				
2	08	xx	16					Program Kesehatan Reproduksi Remaja			40	50	60	70	80	80	80	80.000.000	90	150.000.000	90	230.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan				
2	08	xx	17					Program Pelayanan Kontrasepsi			na	na	30	35	40	40	40	100.000.000	45	200.000.000	45	300.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan				
2	08	xx	18					Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			na	na	35	40	45	45	45	100.000.000	50	200.000.000	50	300.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan				
2	08	xx	19					Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat			50	52	55	65	75	75	75	1.000.000.000	85	1.100.000.000	85	2.100.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan				

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	R	P	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2 08 xx 20	Program pengembangan pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Forum KRR	%	50	55	6-	70	80	50.000.000	90	100.000.000	90	150.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan			
2 08 xx 22	Program Pengembangan bahan informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase KJE tumbuh kembang anak	%	na	na	20	25	30	150.000.000	35	200.000.000	35	350.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan			
2 08 xx 23	Program penyediaan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase ketersediaan Tenaga Pendamping KBK	%	60	62	65	70	80	50.000.000	85	100.000.000	85	150.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan			
1 02 xx 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75	75	80	85	90	475.000.000	100	600.000.000	100	1.075.000.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peremajaan dan			
2 09	PERHUBUNGAN	2	15			Perhubungan								7.675.045.113		8.128.685.113		15.803.730.226				
x xx xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	3.825.025.113	100	3.825.025.113	100	7.650.050.226	Dinas Perhubungan			
x xx xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100		Dinas Perhubungan			
x xx xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90		Dinas Perhubungan			
2 09 xx 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persentase Prasarana LLAJ dirn kondisi baik	%	67	67	70	73	78	410.000.000	82	650.000.000	82	1.060.000.000	Dinas Perhubungan			
2 09 xx 17	Program peningkatan pelayanan angkutan					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ljin trayek	%	65	65	70	75	80	507.160.000	85	600.000.000	85	1.107.160.000	Dinas Perhubungan			
2 09 xx 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio panjang jalan per jumlah	%	65	65	69	73	79	225.000.000	80	450.000.000	80	675.000.000	Dinas Perhubungan			
2 09 xx 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan APIL	%	67	67	72	75	80	1.195.000.000	85	1.215.800.000	85	2.410.800.000	Dinas Perhubungan			
	program pembangunan prasarana dan Fasilitas perhubungan / (lla)													1.512.860.000		1.387.860.000		2.900.720.000	Dinas Perhubungan			
2 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	16			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		%						6.462.165.885		6.562.165.885		13.024.331.770				
x xx xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	3.682.165.885	100	3.682.165.885	100	7.364.331.770	Dinas Komunikasi dan Informatika			
x xx xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika			
x xx xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90		Dinas Komunikasi dan Informatika			
2 10 xx 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi Informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80	2.090.000.000	85	2.090.000.000	85	4.180.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2 10 xx 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ASN yang menguasai TIK	%	50	50	60	70	80		90		90		Dinas Komunikasi dan Informatika			
2 10 xx 20	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengembangan-Gov	%	35		40	45	60		75		75		Dinas Komunikasi dan Informatika			
2 10 xx 18	Program kerjasama Informasi dengan mas media					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi Informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80	690.000.000	90	790.000.000	90	1.480.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2 10 xx 19	Program Pengelolaan Informasi Publik					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik yang dikelola	%	45		50	55	60		70		70		Dinas Komunikasi dan Informatika			
2 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	17			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								6.794.693.248		6.794.693.248		13.589.386.496				
x xx xx 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	4.944.693.248	100	4.944.693.248	100	9.889.386.496				
x xx xx 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100					

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U r u s a n	B U d u a s a n	P r o g r a m	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85				90		90		
2	11	xx	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Peningkatan Sistem pendukung UKM	%	40	40	50		60	70	850.000.000	85	850.000.000	85	1.700.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil	
2	11	xx	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN		Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi	%	50	50	60		70	80	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	2.000.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil	
2	12			PENANAMAN MODAL	2	18		PENANAMAN MODAL								6.025.409.474		6.179.659.474		12.205.068.948		
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100		100	100	4.775.409.474	100	4.775.409.474	100	9.550.818.948	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90		95	100			100			Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur					Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85				90		90	
2	12	xx	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Promosi Produk Unggulan daerah	%	45	50	60		70	80	1.000.000.000	90	1.104.250.000	90	2.104.250.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
2	12	xx	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					Indeks Realisasi Investasi	%	40	45	50		55	60	250.000.000	65	300.000.000	65	550.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
2	13			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								9.045.117.550		8.896.552.685		17.941.670.235		
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100		100	100	4.787.595.185	100	4.787.595.185	100	9.575.190.370	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90		95	100			100			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur					Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80			85				90		90	
2	13	xx	15	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase peningkatan kualitas tenaga olahraga	%	na	50	60		70	80	300.000.000	90	300.000.000	90	600.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	13	xx	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga					Persentase atlet berprestasi	%	na	50	60		70	80	1.652.522.365	90	1.278.510.000	90	2.931.032.365	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	13	xx	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				Rasio lapangan olahraga/satuan penduduk	%	20	25	30		35	40	1.555.000.000	45	1.485.000.000	45	3.040.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	13	xx	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase OKP yang aktif	%	40	45	50		60	70	700.000.000	80	995.447.500	80	1.695.447.500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2	13	xx	17	Program peningkatan upaya pertumbuhan, kewirausahaan dan kecakapan hidup					Persentase wirausahaan muda	%	na	na	30		35	40	50.000.000	45	50.000.000	45	100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	14			STATISTIK	2	20		STATISTIK								400.000.000		450.000.000		850.000.000		
2	14	xx	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase ketersediaan data statistik sektoral/daerah	%	30	30	45		55	65	400.000.000	75	450.000.000	75	850.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	15			PERSANDIAN	2	21		PERSANDIAN								300.000.000		350.000.000		650.000.000		
2	15	xx	15	Program Pengamanan, Informasi		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Informasi yang diamankan	%	na	na	20		30	35	250.000.000	40	250.000.000	40	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	15	xx	16	Program Pola Hubungan Jaringan persandian		PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase Koordinasi jaringan persandian	%	na	na	0		10	20	50.000.000	30	100.000.000	30	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16			KEBUDAYAAN	2	22		KEBUDAYAAN								4.538.198.955		5.038.198.955		9.576.397.910		
								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								2.455.000.000		2.915.000.000		5.370.000.000		
2	16	xx	15	Program Pengembangan Nilai Budaya		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase peletarian dan aktualisasi budaya gayo	%	na	na	50		55	60	1.055.000.000	65	1.165.000.000	65	2.220.000.000	Dinas Pendidikan	
2	16	xx	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				Persentase penyelenggaraan festival budaya	%	na	65	68		72	75	750.000.000	80	950.000.000	80	1.700.000.000	Dinas Pendidikan	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			U r u s a n	B U d u s a s a n a n g n	P r o g r a m	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
2	16	xx	16				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	persentase pemeliharaan benda budaya	%	na	60		65		70		75	650.000.000	80	800.000.000	80	1.450.000.000	Dinas Pendidikan	
							Sekretariat MAG											2.083.198.955		2.123.198.955		4.206.397.910		
x	xx	xx	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95		100		100		100	1.388.198.955	100	1.388.198.955	100	2.776.397.910	Sek. MAG	
x	xx	xx	02					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90		90		95		100				100	-	Sek. MAG	
x	xx	xx	03					Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		80		85						90	90	-	Sek. MAG
2	16	xx	15				Program Sekretariat Majelis Adat Gayo	Persentase peletarian dan aktualisasi budaya gayo	%	na	na		50		55		60	695.000.000	65	735.000.000	65	1.430.000.000	Sek. MAG	
2	16	xx	17					Persentase penyelenggaraan festival budaya	%	na	65		68		72		75				80	80	-	Sek. MAG
2	16	xx	16					persentase pemeliharaan benda budaya	%	na	60		65		70		75				80	80	-	Sek. MAG
2	17						PERPUSTAKAAN											5.069.261.127		5.269.261.127		10.338.522.254		
x	xx	xx	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95		100		100		100	4.269.261.127	100	4.269.261.127	100	8.538.522.254	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
x	xx	xx	02					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90		90		95		100				100	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
x	xx	xx	03					Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		80		85						90	90	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	17	xx	07				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	%	45	50		55		60		65	800.000.000	80	1.000.000.000	80	1.800.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	18						KERASIPAN											525.000.000		1.390.000.000		1.915.000.000		
2	18	xx	15				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara	%	50	50		55		60		65	200.000.000	75	450.000.000	75	650.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	18	xx	17					Persentase Sarpras kearsipan dalam kondisi baik	%	65	65		70		75		80	25.000.000	85	490.000.000	85	515.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	18	xx	16				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang dilestarikan	%	50	50		60		65		70	300.000.000	75	450.000.000	75	750.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3							Urusan Pilihan																-	
3	01						Kelautan dan Perikanan											8.857.122.051		9.457.122.051		18.314.244.102		
x	xx	xx	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95		100		100		100	3.157.122.051	100	3.157.122.051	100	6.314.244.102		
x	xx	xx	02					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90		90		95		100				100	-		
x	xx	xx	03					Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		80		85						90	90	-	
3	01	xx	20				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan Budidaya	ton	611,9	618,8		633		660,2		667	2.128.000.000	670,7	2.258.000.000	670,7	4.386.000.000	Dinas Perikanan	
3	01	xx	21					Persentase Produksi perikanan tangkap	ton	200	202,2		206,9		215,8		218	922.350.000	219,2	900.000.000	219,2	1.822.350.000	Dinas Perikanan	
3	01	xx	25				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	%	50	55		60		70		80	71.560.000	90	92.000.000	90	163.560.000	Dinas Perikanan	
3	01	xx	26					Persentase TPUP	%	60	60		70									-	Dinas Perikanan	
3	01	xx	27					Persentase konservasi sumberdaya perikanan	%	35	40		50		60		70	411.500.000	80	475.000.000	80	886.500.000	Dinas Perikanan	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U r u s a n	B U d a s a n a g n	P R O g r a m	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	01	xx	28		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Persentase UPR yang dibina	%	50	55	60	70	80	855.000.000	90	973.000.000	90	1.828.000.000	Dinas Perikanan			
3	01	xx	31			Persentase pengembangan perbenihan perikanan	%	1,66	2,9	5,52	8,13	11,73	841.340.000	14,55	1.010.000.000	14,55	1.851.340.000	Dinas Perikanan			
3	01	xx	32			Aangka Konsumsi Ikan	g/Kapita/tahun	30	31	35	37	38	470.250.000	95	592.000.000	95	1.062.250.000	Dinas Perikanan			
3	02			3	26	PARIWISATA							6.355.987.635		6.350.447.500		12.706.435.135				
3	02	xx	15		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Promosi wisata	%	30	30	35	40	50	1.297.237.635	60	1.475.447.500	60	2.772.685.135	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga			
3	02	xx	16		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE Destinasi pariwisata YG DIBINA	%	45	50	55	60	65	4.758.750.000	70	4.625.000.000	70	9.383.750.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga			
3	02	xx	17		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA pariwisata dan e-trafi	Persentase Pokdarwis	%	20	25	30	35	40	300.000.000	45	250.000.000	45	550.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga			
3	03			3	27	Pertanian							42.255.909.872		41.023.595.872		83.279.505.744				
x	xx	xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	12.418.595.872	100	12.418.595.872	100	24.837.191.744				
x	xx	xx	02			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-				
x	xx	xx	03			Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-				
3	03	xx	15		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan NTP	%	50	55	60	70	80	7.670.000.000	90	7.670.000.000	90	15.340.000.000	Dinas Pertanian			
3	03	xx	19			Persentase Peningkatan Produksi hasil pertanian/perkebunan	%	60	60	70	75	80	12.891.314.000	90	12.185.000.000	90	25.076.314.000	Dinas Pertanian			
##	#REF!	xx	22			Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	%	50	50	60	70	80	3.400.000.000	90	3.900.000.000	90	7.300.000.000	Dinas Pertanian			
##	#REF!	xx	18			Persentase penerapan TTG	%	50	50	60	70	80	421.000.000	90	700.000.000	90	1.121.000.000	Dinas Pertanian			
3	03	xx	23		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	nilai Tukar peternak	Nilai	112,3	113	114	116	118	665.000.000	120	355.000.000	120	1.020.000.000	Dinas Pertanian			
##	#REF!	xx	24			persentase IB yngberhadil	%	na	na	40	50	60	410.000.000	70	415.000.000	70	825.000.000	Dinas Pertanian			
3	03	xx	17		Program Penyuluhan Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	44	45	50	50	50	1,380.000.000	50	730.000.000	50	2.110.000.000	Dinas Pertanian			
##	#REF!	xx	20			Persentase Penyulu pertanian bersertifikat	%	60	60	70	80	90	1,900.000.000	95	1.550.000.000	95	3.450.000.000	Dinas Pertanian			
3	03	xx	21		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit	%	45	50	60	70	80	550.000.000	90	550.000.000	90	1.100.000.000	Dinas Pertanian			
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana								350.000.000		350.000.000		700.000.000	Dinas Pertanian			
					Program Perizinan Usaha								200.000.000		200.000.000		400.000.000	Dinas Pertanian			
3	05				Energi dan Sumberdaya Mineral																
3	06			3	30	PERDAGANGAN							7.550.000.000		8.000.000.000		15.550.000.000				
3	06	xx	15		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Persentase pengawasan barang perdagangan	%	40	45	50	60	70	200.000.000	80	200.000.000	80	400.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	P	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
3	06	xx	17			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	40	45	50	60	70	1,500.000.000	80	1.750.000.000	80	3.250.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3	06	xx	18			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pengembangan perdagangan dim negeri	%	na	na	50	60	70	5.600.000.000	80	5.700.000.000	80	11.300.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3	06	xx	19			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	40	40	50	60	70	250.000.000	80	350.000.000	80	600.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3	07				3	31	PERINDUSTRIAN							5.550.000.000		5.350.000.000		10.900.000.000			
3	07	xx	15			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	Persentase Inovasi Industri kecil yang dibina	%	na	na	15	20	25	350.000.000	30	400.000.000	30	750.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3	07	xx	16			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pertumbuhan Industri	%	na	30	35	40	50	2.400.000.000	60	2.500.000.000	60	4.900.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3	07	xx	17			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Penerapan teknologi Industri	%	na	na	20	25	30	2.500.000.000	35	2.000.000.000	35	4.500.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3	07	xx	18			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penataan struktur Industri	%	na	20	25	30	35	300.000.000	40	450.000.000	40	750.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3	08				3	32	TRANSMIGRASI							1.550.000.000		1.800.000.000		3.350.000.000			
3	08	xx	15			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigran	%	60	63	65	70	75	1.000.000.000	80	1.200.000.000	80	2.200.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
3	08	xx	16			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigrasi swakarsa	%	45	45	50	55	60	550.000.000	65	600.000.000	65	1.150.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
4					4		Unsur Penunjang							56.079.188.416		56.622.605.388		112.701.793.804			
4	01						Administrasi Pemerintahan														
					4	1	Setdakab							44.487.799.898		44.305.267.630		88.793.067.528			
x	xx	xx	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	30.472.799.898	100	30.895.267.630	100	61.368.067.528	Setdakab	
x	xx	xx	02				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100		Setdakab	
x	xx	xx	03				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90		Setdakab	
1	06	xx	15				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang telah dibina	%	60	60	65	70	80	4.010.000.000	80	4.110.000.000	80	8.120.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	xx	19				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase prolegda yang terrealisasi	%	75	75	80	85	90		95		95		Sekretariat Daerah	
4	01	xx	20				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kinerja Penataan daerah Otonomi	%	55	55	60	70	80		90		90		Sekretariat Daerah	
4	01	xx	21				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Pembangunan syariah Islam	%	50	55	60	65	70		85		85		Sekretariat Daerah	
4	01	xx	23				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase PBJ yang terrealisasi	%	60	60	70	75	80	3.410.000.000	90	3.650.000.000	90	7.060.000.000	Sekretariat Daerah	
2	14	xx	15				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketersediaan data statistik sektoral/daerah	%	30	30	45	55	65		75		75		Sekretariat Daerah	
3	07	xx	15				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Inovasi Industri kecil yang dibina	%	na	na	15	20	25		30		30		Sekretariat Daerah	
3	07	xx	16				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pertumbuhan Industri	%	na	30	35	40	50		60		60		Sekretariat Daerah	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	P	P	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3	06	xx	15				Persentase pengawasan barang perdagangan	%	40	45	50	60	70	80	-	Sekretariat Daerah						
2	12	xx	15				Persentase Promosi Produk Unggulan daerah	%	45	50	60	70	80	1.000.000.000	90	1.000.000.000	Sekretariat Daerah					
4	01	xx	16				Persentase layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	75	75	80	84	88	5.595.000.000	90	5.650.000.000	Sekretariat Daerah					
2	10	xx	18			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi Informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80	90	-	setdakab						
2	10	xx	19				Persentase Informasi publik yang dikelola	%	45		50	55	60	70	-	setdakab						
2	10	xx	17				Persentase ASN yang menguasai TIK	%	50	50	60	70	80	90	-	Setdakab						
2	10	xx	15				Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi Informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80	85	-	Setdakab						
				4	2		Sekretariat DPR							11.591.388.518	12.317.337.758	23.908.726.276						
x	xx	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	7.097.613.518	100	7.561.537.758	100	14.659.151.276	Sekretariat DPRK			
x	xx	xx	02				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100	-	Sekretariat DPRK						
x	xx	xx	03				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80	85	85	90	90	-	Sekretariat DPRK						
4	01	xx	19			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase prolegda yang terrealisasi	%	75	75	80	85	90	4.403.775.000	95	4.605.800.000	95	9.009.575.000	Sekretariat Daerah			
4	01	xx	15				Persentase layanan kedinasan lembaga DPRK	%	75	80	84	88	90	95	-	Sekretariat DPRK						
2	10	xx	15				Persentase pelayanan publik berbasis content teknologi Informasi dan komunikasi	%	50	50	60	70	80	85	-	Sekretariat DPRK						
							Program Layanan dan Administrasi Keuangan							90.000.000	150.000.000	240.000.000	Sekretariat DPRK					
				5			Unsur Pendukung							391.364.451.804	411.691.140.152	803.055.591.955						
4	03			5	1		Perencanaan							13.895.554.924	13.670.554.924	27.566.109.848						
x	xx	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	5.570.554.924	100	5.570.554.924	100	11.141.109.848	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
x	xx	xx	02				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100	100	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
x	xx	xx	03				Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80	85	85	90	90	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
4	03	xx	15			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan	%	85	85	90	90	90	1.313.000.000	90	1.300.000.000	90	2.613.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
4	03	xx	16				Persentase kerjasama pembangunan	%	na	na	30	35	40	250.000.000	45	200.000.000	45	450.000.000	Bappeda			
a	03	xx	20				Persentase Jf Perencana bersertifikat	%	65	65	70	70	75	275.000.000	80	300.000.000	80	575.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
a	03	xx	21				Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target	%	70	70	75	80	85	1.987.000.000	90	2.000.000.000	90	3.987.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	P	U	B	P	Metetaan Pemendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
a 03	xx 22							PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Ekonomi	%	73	73	75	80	85	1.700.000.000	90	1.550.000.000	90	3.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
a 03	xx 23							PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial Budaya	%	75	75	80	80	85	1.650.000.000	90	1.550.000.000	90	3.200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
a 03	xx 24							PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Prasarana wilayah	%	60	60	65	70	75	1.150.000.000	80	1.200.000.000	85	2.350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
a 04								KEUANGAN	BPKD							360.380.661.001		381.382.349.349		741.763.010.349				
x xx	xx 01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	43.609.729.263	100	43.609.729.263	100	87.219.458.525	Badan Pengelolaan Keuangan			
x xx	xx 02							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100			100		100	-	Badan Pengelolaan Keuangan		
x xx	xx 03							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85				90		90	-	Badan Pengelolaan Keuangan		
4 04	xx 17							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel	%	30	30	15	10	10	1.101.500.000	10	1.200.000.000	10	2.301.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan			
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel							1.982.915.000		2.000.000.000		3.982.915.000	Badan Pengelolaan Keuangan			
4 04	xx 18							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan yang dibina	%	50	50	60	65	70	3.976.000.000	75	4.000.000.000	75	7.976.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan			
4 04	xx 19							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tertib Administrasi keuangan Desa	%	75	75	79	82	86	400.000.000	90	400.000.000	90	800.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan			
								Belanja Tidak Terduga								5.000.000.000		5.000.000.000		10.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan			
								Belanja Transfer								304.310.516.738		325.172.620.086		629.483.136.824	Badan Pengelolaan Keuangan			
4 05								KEPEGAWAIAN								11.038.235.879		10.388.235.879		21.426.471.758				
x xx	xx 01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	7.188.235.879	100	7.188.235.879	100	14.376.471.758	BKPSDM			
x xx	xx 02							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100			100		100	-	BKPSDM		
x xx	xx 03							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85				90		90	-	BKPSDM		
4 05	xx 31							KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase dokumen formasi jabatan	%	75	75	80	85	85	2.750.000.000	90	2.500.000.000	90	5.250.000.000	BKPSDM			
x xx	xx 04							KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase proses pemulangan/pensiun/mutasi tepat waktu	%	90	90	90	95	95	150.000.000	95	200.000.000	95	350.000.000	BKPSDM			
x xx	xx 08							KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase SOP dan Standar Kompetensi	%	70	70	75	80	80	950.000.000	85	500.000.000	85	1.450.000.000	BKPSDM			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	P	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
4	06				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									3,550,000,000		3,250,000,000		6,800,000,000			
4	06	xx	29		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	40	50	60	70	80	350,000,000	90	450,000,000	90	800,000,000	BKPSDM			
4	06	xx	30		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	60	60	60	65	70	2,700,000,000	80	2,750,000,000	80	5,450,000,000	BKPSDM			
x	xx	xx	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	%	50	55	60	70	80	500,000,000	90	50,000,000	90	550,000,000	BKPSDM			
4	07				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									2,500,000,000		3,000,000,000		5,500,000,000			
4	07	xx	15		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Inovasi daerah yang dimanfaatkan	%	na	na	60	65	70	2,500,000,000	75	3,000,000,000	75	5,500,000,000	Bappeda			
				6	Unsur Pengawasan									9,173,357,958		9,703,357,958		18,876,715,916			
4	02			6	Inspektorat									9,173,357,958		9,703,357,958		18,876,715,916			
x	xx	xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	6,153,357,958	100	6,553,357,958	100	12,706,715,916	Inspektorat Kabupaten			
x	xx	xx	02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Inspektorat Kabupaten			
x	xx	xx	03		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Inspektorat Kabupaten			
4	02	xx	15		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	%	Na	10	12	15	17	2,600,000,000	20	2,600,000,000	20	5,200,000,000	Inspektorat Kabupaten			
4	02	xx	16		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jabatan fungsional APIP yang bersertifikasi	Orang	28	31	34	38	43	350,000,000	48	450,000,000	48	800,000,000	Inspektorat Kabupaten			
4	02	xx	17		PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan area reformasi birokrasi PD	%	49,03	50	51	53	54	70,000,000	55	100,000,000	55	170,000,000	Inspektorat Kabupaten			
				7	Unsur Kewilayahan									44,470,816,017		44,620,816,017		89,091,632,034			
				7	Kecamatan									44,470,816,017		44,620,816,017		89,091,632,034			
x	xx	xx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan, layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	37,574,304,017	100	37,574,304,017	100	75,148,608,034	Kecamatan			
x	xx	xx	02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Kecamatan			
x	xx	xx	03		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Kecamatan			
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Monitoring dan evaluasi DD								1,478,514,000		1,478,514,000		2,957,028,000	Kecamatan		
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa												-	Kecamatan		
2	07	xx	17		PROGRAM	Musrenbang Kecamatan	%	40	40	50	60	70	1,325,612,000	80	1,325,612,000	80	2,651,224,000	Kecamatan			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U	B	P	U	R	P	Metataan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
								PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan peran Mukim	%	60						80		85		85	-	Kecamatan	
									Penyelenggaraan PATEN													-	Kecamatan	
								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Syar'at Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam								1.746.416.000		1.746.416.000			3.492.832.000	Kecamatan	
									MTQ Tk Kecamatan													-	Kecamatan	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya pelayanan sosial dan masyarakat (Puspita, BKMT, PKK, sosialisasi KDRT, PHBS, Gizi)								1.395.970.000		1.395.970.000			2.791.940.000	Kecamatan	
1	05	xx	17					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ormas yang dibina	%	na	na	40	50	60	950.000.000	65	1.100.000.000	65	2.050.000.000			Kecamatan	
					8			Unsur Pemerintahan Umum								14.388.529.789		14.147.129.789			28.535.659.578			
					8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik								3.429.839.162		3.629.839.162			7.059.678.324			
x	xx	xx	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	1.729.839.162	100	1.729.839.162	100	3.459.678.324			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
x	xx	xx	02						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100			100		100			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
x	xx	xx	03						Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85					90		90			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	xx	17					DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang dibina	%	na	na	40	50	60	550.000.000	65	450.000.000	65	1.000.000.000			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	05	xx	19					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kerjasama dimenjadi ketertiban dan keamanan	%	30	30	40	55	65	250.000.000	80	400.000.000	80	650.000.000			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	05	xx	16						persentase penegakan Qanun	%	60				80	100.000.000	85	100.000.000	85	200.000.000			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	05	xx	20					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penerbitan PEKAT	%	40	45	50	60	70	350.000.000	85	450.000.000	85	800.000.000			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	05	xx	21					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	75	80	85	87	90	450.000.000	95	500.000.000	95	950.000.000			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
					9			Unsur Kekhususan																
					9	1		Keagamaan																
								Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah								8.784.655.406		8.284.655.406			17.069.310.812			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	U r u s a n	B U r u d u s a s a n a g n	P r o g r a m	Pemetaan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAFRAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	3.784.655.406	100	3.784.655.406	100	7.569.310.812	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
4	01	xx	22	Program Peningkatan Kualitas Dakwah dan Sy'ar Islam	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH *****)	Persentase Ketersediaan Pendakwah/Ustaz bersertifikat	%	na	na	30	35	40	5.000.000.000	45	4.500.000.000	45	9.500.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
					Sekretariat MPU								1.773.200.903		1.946.800.903		3.720.001.806				
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAFRAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	1.073.200.903	100	1.096.800.903	100	2.170.001.806	Sekr. MPU			
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Sekr. MPU			
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Sekr. MPU			
4	01	xx	24	Program Optimalisasi Peran dan Fungsi Ulama	PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN	Persentase fatwa/tahun	%	65	65	70	75	80	700.000.000	85	850.000.000	85	1.550.000.000	Sekr. MPU			
					Sekretariat Baitul Mal								2.100.834.318		2.185.834.318		4.286.668.636				
x	xx	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi perkantoran	%	95	95	100	100	100	1.450.834.318	100	1.465.834.318	100	2.916.668.636	Sek. Baitul Mal			
x	xx	xx	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	90	90	95	100		100		100	-	Sek. Baitul Mal			
x	xx	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase Peningkatan disiplin aparatur	%	80	80		85			90		90	-	Sek. Baitul Mal			
4	01	xx	21	Program Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam	Program Sekretariat Baitul Mal	Indeks Pembangunan syariat Islam	%	50	55	60	65	70	650.000.000	85	720.000.000	85	1.370.000.000	Sek. Baitul Mal			
					JUMLAH								1.357.765.140.680		1.469.754.269.079		2.827.519.409.758				

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode Tahun 2017-2022 . Beberapa Indikator yang telah melampaui target kinerja dirubah dengan menetapkan target Kinerja baru, secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,20	4,44	4,68	4,92	5,00
2	Indeks Gini	Nilai	0,30	0,29	0,28	0,225	0,210
3	Angka kemiskinan	%	16,30	15,75	14,22	13,35	12,15
4	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	32,20	33,46	34,53	35,70	36,80
5	Angka pengangguran terbuka	%	3,13	3,00	2,50	2,00	1,50
6	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,52	2,46	2,40	2,34	2,28
7	Indeks Kepuasan pelayanan Perizinan	%	79,75	81,35	82,78	85,00	90,00
8	Meningkatnya kunjungan wisata	%	65,00	63,00	65,00	70,00	75,00
9	Rasio PAD	%	10,35	10,48	10,68	10,75	11,00
10	Indeks Pembangunan Manusia	%	72,15	72,43	72,61	73,59	73,78
11	Tingkat capaian SNP pendidikan dasar	%	89,15	90,43	94,65	97,35	99,80
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	%	78,65	80,15	83,65	85,24	89,78
13	Tingkat prestasi generasi muda	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
14	Jumlah kampung Marwah (Smart Village)	Kampung	6,00	14,00	25,00	40,00	75,00
15	Indeks pembangunan infrastruktur	%	55,35	58,42	61,53	64,13	68,98
16	Indeks aksesibilitas	%	56,18	58,95	61,25	64,08	68,79
17	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, permukiman dan kawasan	%	54,52	57,89	61,82	64,19	69,18
20	Rrasio rintisan kampung adat	%	N/A	10,00	20,00	30,00	40,00
21	Indeks kualitas lingkungan hidup	%	79,15	79,22	79,29	79,36	79,44

No	Indikator	Satuan	Target Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022
22	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Nilai	50,00	51	52	52	53,00
23	Kategori Implementasi atas SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	BB
24	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	79,00	81,35	82,65	83,89	85,00
26	Indeks PEGI/SPBE	Nilai	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50
27	Indeks keshalehan sosial masyarakat	%	na	50,00	55,00	65,00	75,00
28	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
29	Persentase penegakan peraturan dan penanganan konflik sosial	%	35,00	40,00	50,00	55,00	60,00
30	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
31	Persentase keben pegerni kampung (demapan)	%	72,26	75,00	76,85	79,26	80,00

BAB IX

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Perubahan RPJMD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

IX.1 Pedoman Transisi

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK). Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022, perlu disusun RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022-2027 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 akan didasarkan pada RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025, RKPA Tahun 2023, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

IX.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2022. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Aceh Tengah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat;
- b. Bupati Aceh Tengah menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;

- c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022

IX.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan :

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

 BUPATI ACEH TENGAH, 


SHABELA ABUBAKAR